



BUPATI BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA  
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015  
TENTANG PENETAPAN DESA DI KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur penetapan desa di Kabupaten Blora;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, maka data dinamis pada pemerintahan Desa sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Blora;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

dan

BUPATI BLORA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN DESA DI KABUPATEN BLORA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa di Kabupaten Blora.
  - (2) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak dalam cakupan wilayah Kecamatan.
  - (3) Nama Desa, kode Desa dan luas wilayah Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
2. Ketentuan Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 18 September 2018

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora  
pada tanggal 18 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

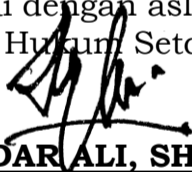
Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2018 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA, PROVINSI JAWA  
TENGAH: ( 13/2018 )

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



**A. KAIDAR ALI, SH. MH.**  
NIP. 19610103 198608 1 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA  
NOMOR 13 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015  
TENTANG PENETAPAN DESA DI KABUPATEN BLORA

I. UMUM

Penetapan Desa di Kabupaten Blora merupakan amanat Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penetapan desa dilaksanakan dalam rangka memberikan kepastian akan kedudukan Desa beserta batas wilayah desa yang mengikutinya maka perlu ditetapkan nama-nama desa dan batas-desa di Kabupaten Blora. Pemerintah Kabupaten Blora telah melaksanakan amanat penetapan Desa dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah dimaksud. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Blora.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 13

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA

NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN  
2015 TENTANG PENETAPAN DESA DI KABUPATEN BLORA

NAMA DESA, KODE DESA, DAN LUAS WILAYAH DESA DI  
KABUPATEN BLORA

KODE	NAMA PROVINSI DAN KABUPATEN	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	LUAS WILAYAH (Ha)
33.	PROVINSI JAWA TENGAH			
33.16	KABUPATEN BLORA			
33.16.01		1. JATI		
33.16.01.2001			1. BANGKLEYAN	7,40
33.16.01.2002			2. GEMPOL	58
33.16.01.2003			3. KEPOH	23,19
33.16.01.2004			4. PELEM	8,55
33.16.01.2005			5. JEGONG	25,83
33.16.01.2006			6. JATI	16,35
33.16.01.2007			7. SINGGET	10,81
33.16.01.2008			8. GABUSAN	9,62
33.16.01.2009			9. DOPLANG	16,10
33.16.01.2010			10. RANDULAWANG	5,60
33.16.01.2011			11. TOBO	11,65
33.16.01.2012			12. PENGKOLJAGONG	11,94
33.16.02		2. RANDUBLATUNG		
33.16.02.2001			1. TLOGOTUWUNG	4,00
33.16.02.2002			2. BODEH	24,98
33.16.02.2003			3. GEMBYUNGAN	9,46
33.16.02.2004			4. SAMBONGWANGAN	9,40
33.16.02.2006			5. PILANG	6,29
33.16.02.2007			6. TEMULUS	10,46

KODE	NAMA PROVINSI DAN KABUPATEN	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	LUAS WILAYAH (Ha)
33.16.02.2008			7. SUMBEREJO	5,87
33.16.02.2009			8. KUTUKAN	18,16
33.16.02.2010			9. KEDIREN	10,35
33.16.02.2012			10. KADENGAN	8,39
33.16.02.2013			11. BEKUTUK	5,16
33.16.02.2014			12. PLOSOREJO	10,24
33.16.02.2015			13. JERUK	7,13
33.16.02.2016			14. TANGGEL	32,65
33.16.02.2017			15. KALISARI	12,93
33.16.02.2018			16. NGLIRON	17,64
33.16.03		3. KRADENAN		
33.16.03.2001			1. MEGERI	5,31
33.16.03.2002			2. NGLEBAK	28,35
33.16.03.2003			3. GETAS	17,45
33.16.03.2004			4. NGINGGIL	12,18
33.16.03.2005			5. NGRAWOH	7,72
33.16.03.2006			6. MENDENREJO	12,81
33.16.03.2007			7. SUMBER	13,69
33.16.03.2008			8. MOJOREMBUN	5,18
33.16.03.2009			9. NGLUNGGER	2,04
33.16.03.2010			10. MEDALEM	4,78
33.16.04		4. KEDUNGTUBAN		
33.16.04.2001			1. GONDEL	5,03
33.16.04.2002			2. KETUWAN	3,51
33.16.04.2003			3. JIMBUNG	2,35
33.16.04.2004			4. PANOLAN	2,14
33.16.04.2005			5. KLAGEN	2,22
33.16.04.2006			6. KEMANTREN	5,02
33.16.04.2007			7. SIDOREJO	3,61
33.16.04.2008			8. WADO	8,04
33.16.04.2009			9. PULO	3,01
33.16.04.2010			10. TANJUNG	5,04

KODE	NAMA PROVINSI DAN KABUPATEN	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	LUAS WILAYAH (Ha)
33.16.04.2011			11. SOGO	5,28
33.16.04.2012			12. BAJO	4,51
33.16.04.2013			13. NGLANDEYAN	5,56
33.16.04.2014			14. KALEN	7,62
33.16.04.2015			15. NGRAHO	18,65
33.16.04.2016			16. KEDUNGTUBAN	14,23
33.16.04.2017			17. GALUK	11,21
33.16.05		5. CEPU		
33.16.05.2001			1. GADON	1,87
33.16.05.2002			2. NGLORAM	3,88
33.16.05.2003			3. CABEAN	4,65
33.16.05.2004			4. KAPUAN	2,50
33.16.05.2005			5. JIPANG	1,93
33.16.05.2006			6. GETAS	2,78
33.16.05.2007			7. SUMBERPITU	1,13
33.16.05.2008			8. KENTONG	2,65
33.16.05.2009			9. MERNUNG	3,40
33.16.05.2010			10. MULYOREJO	3,12
33.16.05.2012			11. NGLANJUK	1,44
33.16.06		6. SAMBONG		
33.16.06.2001			1. TEMENGENG	12,02
33.16.06.2002			2. SAMBONGREJO	21,84
33.16.06.2003			3. GADU	9,51
33.16.06.2004			4. SAMBONG	5,21
33.16.06.2005			5. POJOKWATU	4,56
33.16.06.2006			6. GAGAKAN	4,61
33.16.06.2007			7. BITING	2,29
33.16.06.2008			8. BRABOWAN	5,34
33.16.06.2009			9. LEDOK	12,40
33.16.06.2010			10. GIYANTI	10,97
33.16.07		7. JIKEN		
33.16.07.2001			1. NGLOBO	20,62



KODE	NAMA PROVINSI DAN KABUPATEN	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	LUAS WILAYAH (Ha)
33.16.07.2002			2. CABAK	14,70
33.16.07.2003			3. NGLBUR	29,84
33.16.07.2004			4. JANJANG	9,90
33.16.07.2005			5. BLEBOH	26,55
33.16.07.2006			6. KETRINGAN	18,63
33.16.07.2007			7. SINGONEGORO	17,00
33.16.07.2008			8. JIKEN	18,95
33.16.07.2009			9. GENJAHAN	2,67
33.16.07.2010			10. JIWOREJO	3,30
33.16.07.2011			11. BANGOWAN	6,01
33.16.08		8. JEPON		
33.16.08.2001			1. BLUNGUN	13,70
33.16.08.2002			2. SEMANGGI	21,02
33.16.08.2003			3. NGAMPON	2,26
33.16.08.2004			4. JOMBLANG	9,84
33.16.08.2005			5. PALON	4,14
33.16.08.2006			6. BANGSRI	9,78
33.16.08.2007			7. SUMURBOTO	1,51
33.16.08.2008			8. BRUMBUNG	2,37
33.16.08.2009			9. TURIREJO	3,35
33.16.08.2010			10. SEMAMPIR	1,67
33.16.08.2011			11. KEMIRI	2,22
33.16.08.2012			12. TEMPELLEMAHBANG	3,85
33.16.08.2014			13. SESO	0,98
33.16.08.2015			14. BALONG	1,39
33.16.08.2016			15. GENENG	3,03
33.16.08.2017			16. NGLAROHGUNUNG	2,05
33.16.08.2018			17. KAWENGAN	3,83
33.16.08.2019			18. GERSI	1,31
33.16.08.2020			19. GEDANGDOWO	2,57
33.16.08.2021			20. PULEDAGEL	2,11
33.16.08.2022			21. BACEM	2,84

KODE	NAMA PROVINSI DAN KABUPATEN	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	LUAS WILAYAH (Ha)
33.16.08.2023			22. JATIREJO	2,65
33.16.08.2024			23. SOKO	2,32
33.16.08.2025			24. WARU	2,09
33.16.09		9. BLORA		
33.16.09.2001			1. JEPANGREJO	11,87
33.16.09.2002			2. KAMOLAN	3,71
33.16.09.2003			3. PELEM	1,62
33.16.09.2004			4. PURWOREJO	4,42
33.16.09.2005			5. ANDONGREJO	2,39
33.16.09.2007			6. JEJERUK	0,48
33.16.09.2019			7. TEMUREJO	4,24
33.16.09.2020			8. TEMPUREJO	1,97
33.16.09.2021			9. PATALAN	3,06
33.16.09.2022			10. TAMBAKSARI	4,14
33.16.09.2023			11. PURWOSARI	3,64
33.16.09.2024			12. NGADIPURWO	0,27
33.16.09.2025			13. SENDANGHARJO	8,31
33.16.09.2026			14. TEMPURAN	2,37
33.16.09.2027			15. PLANTUNGAN	2,65
33.16.09.2028			16. NGAMPEL	7,05
33.16.10		10. TUNJUNGAN		
33.16.10.2001			1. TAWANGREJO	4,58
33.16.10.2002			2. KEDUNGRINGIN	1,84
33.16.10.2003			3. ADIREJO	5,08
33.16.10.2004			4. TAMANREJO	2,85
33.16.10.2005			5. TUTUP	3,13
33.16.10.2006			6. SUKOREJO	5,28
33.16.10.2007			7. TAMBAHREJO	7,55
33.16.10.2008			8. KALANGAN	5,35
33.16.10.2009			9. SAMBONGREJO	6,76
33.16.10.2010			10. TUNJUNGAN	29,70
33.16.10.2011			11. KEDUNGREJO	9,16

KODE	NAMA PROVINSI DAN KABUPATEN	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	LUAS WILAYAH (Ha)
33.16.10.2012			12. GEMPOLREJO	5,79
33.16.10.2013			13. NGLANGITAN	7,56
33.16.10.2014			14. KESER	2,61
33.16.10.2015			15. SITIREJO	4,58
33.16.11		11. BANJAREJO		
33.16.11.2001			1. JATISARI	2,60
33.16.11.2002			2. JATIKLAMPOK	4,97
33.16.11.2003			3. KLOPODUWUR	8,81
33.16.11.2004			4. SIDOMULYO	12,79
33.16.11.2005			5. BALONGSARI	10,53
33.16.11.2006			6. BACEM	11,53
33.16.11.2007			7. WONOSEMI	3,27
33.16.11.2008			8. SENDANGGAYAM	1,89
33.16.11.2009			9. BANJAREJO	13,31
33.16.11.2010			10. MOJOWETAN	3,92
33.16.11.2011			11. SUMBERAGUNG	6,08
33.16.11.2012			12. GEDONGSARI	2,07
33.16.11.2013			13. SENDANGWUNGU	2,30
33.16.11.2014			14. BALONGREJO	1,35
33.16.11.2015			15. KARANGTALUN	3,42
33.16.11.2016			16. KEBONREJO	3,27
33.16.11.2017			17. KEMBANG	2,36
33.16.11.2018			18. SEMBONGIN	3,16
33.16.11.2019			19. PLOSOREJO	1,80
33.16.11.2020			20. BULUROTO	4,09
33.16.12		12. NGAWEN		
33.16.12.2001			1. ROWOBUNGKUL	9,22
33.16.12.2002			2. GEDEBEG	4,72
33.16.12.2003			3. SAMBONGANYAR	13,09
33.16.12.2004			4. KENDAYAAN	1,72
33.16.12.2005			5. PLUMBON	1,58
33.16.12.2006			6. BERGOLO	2,18

KODE	NAMA PROVINSI DAN KABUPATEN	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	LUAS WILAYAH (Ha)
33.16.12.2007			7. BANDUNGROJO	2,71
33.16.12.2008			8. KEDUNGSATRIYAN	2,28
33.16.12.2009			9. KARANGTENGAH	3,27
33.16.12.2010			10. JETAKWANGER	6,72
33.16.12.2011			11. SUMBEREJO	2,59
33.16.12.2012			12. SENDANGAGUNG	2,59
33.16.12.2013			13. TALOKWOHMOJO	3,29
33.16.12.2014			14. TREMBULREJO	4,37
33.16.12.2016			15. GONDANG	2,50
33.16.12.2017			16. SENDANGREJO	2,85
33.16.12.2019			17. SEMAWUR	4,10
33.16.12.2020			18. BRADAG	4,92
33.16.12.2021			19. GOTPUTUK	1,89
33.16.12.2022			20. BERBAK	1,15
33.16.12.2023			21. SARIMULYO	3,03
33.16.12.2024			22. SENDANGMULYO	3,12
33.16.12.2025			23. WANTILGUNG	1,04
33.16.12.2026			24. BOGOWANTI	1,01
33.16.12.2027			25. SAMBONGREJO	2,29
33.16.12.2028			26. SRIGADING	4,55
33.16.12.2029			27. KARANGJONG	5,02
33.16.13		13. KUNDURAN		
33.16.13.2001			1. BOTORECO	24,56
33.16.13.2002			2. BULOH	12,20
33.16.13.2003			3. KEMIRI	4,68
33.16.13.2004			4. KODOKAN	1,75
33.16.13.2005			5. SONOKIDUL	4,08
33.16.13.2006			6. SEMPU	3,29
33.16.13.2007			7. CUNGKUP	2,20
33.16.13.2008			8. PLOSOREJO	4,21
33.16.13.2009			9. NGILEN	2,15
33.16.13.2010			10. BAKAH	3,92

KODE	NAMA PROVINSI DAN KABUPATEN	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	LUAS WILAYAH (Ha)
33.16.13.2011			11. KALANGREJO	2,23
33.16.13.2012			12. BLUMBANGREJO	1,89
33.16.13.2013			13. TAWANGREJO	4,67
33.16.13.2014			14. KLOKAH	6,49
33.16.13.2015			15. MURAHARJO	2,95
33.16.13.2016			16. JAGONG	3,45
33.16.13.2018			17. GAGAAN	1,59
33.16.13.2019			18. SAMBIROTO	2,86
33.16.13.2020			19. BEJIREJO	4,64
33.16.13.2021			20. JETAK	2,05
33.16.13.2022			21. KARANGGENENG	5,07
33.16.13.2023			22. BALONG	3,14
33.16.13.2024			23. NGAWENOMBO	11,15
33.16.13.2025			24. SENDANGWATES	2,46
33.16.13.2026			25. KEDUNGWARU	7,21
33.16.14		14. TODANAN		
33.16.14.2001			1. TINAPAN	8,79
33.16.14.2002			2. SAMBENG	2,98
33.16.14.2003			3. PRIGI	2,11
33.16.14.2004			4. PELEMSENGIR	4,93
33.16.14.2005			5. KACANGAN	4,54
33.16.14.2006			6. SONOKULON	4,22
33.16.14.2007			7. KEDUNGWUNGU	9,20
33.16.14.2008			8. GUNUNGAN	1,37
33.16.14.2009			9. KAJENGAN	3,08
33.16.14.2010			10. DRINGO	3,65
33.16.14.2011			11. COKROWATI	3,41
33.16.14.2012			12. KETILENG	3,75
33.16.14.2013			13. TODANAN	4,74
33.16.14.2014			14. NGUMBUL	8,95
33.16.14.2015			15. WUKIRSARI	4,23
33.16.14.2016			16. BICAK	7,24

KODE	NAMA PROVINSI DAN KABUPATEN	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	LUAS WILAYAH (Ha)
33.16.14.2017			17. SENDANG	2,89
33.16.14.2018			18. KARANGANYAR	5,47
33.16.14.2019			19. DALANGAN	3,21
33.16.14.2020			20. CANDI	5,02
33.16.14.2021			21. GONDORIYO	5,10
33.16.14.2022			22. KEMBANG	5,07
33.16.14.2023			23. BEDINGIN	12,16
33.16.14.2024			24. LEDOK	2,99
33.16.14.2025			25. KEDUNGBACIN	9,64
33.16.15		15. BOGOREJO		
33.16.15.2001			1. GOMBANG	2,17
33.16.15.2002			2. SARIREJO	1,85
33.16.15.2003			3. KARANGANYAR	1,54
33.16.15.2004			4. KARANG	2,95
33.16.15.2005			5. PRANTAAN	3,34
33.16.15.2006			6. JERUK	1,64
33.16.15.2007			7. BOGOREJO	4,72
33.16.15.2008			8. GEMBOL	1,84
33.16.15.2009			9. TEMPUREJO	3,26
33.16.15.2010			10. GAYAM	3,83
33.16.15.2011			11. SENDANGREJO	5,47
33.16.15.2012			12. GANDU	4,80
33.16.15.2013			13. NGLENGKIR	8,47
33.16.15.2014			14. JURANGJERO	3,92
33.16.16		16. JAPAH		
33.16.16.2001			1. HARJOWINANGUN	2,12
33.16.16.2002			2. TENGGER	2,94
33.16.16.2003			3. KROCOK	2,97
33.16.16.2004			4. NGAPUS	8,75
33.16.16.2005			5. DOLOGAN	5,09
33.16.16.2006			6. TLOGOWUNGU	5,53
33.16.16.2007			7. JAPAH	1,94

KODE	NAMA PROVINSI DAN KABUPATEN	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	LUAS WILAYAH (Ha)
33.16.16.2008			8. BEGANJING	7,01
33.16.16.2009			9. NGRAMBITAN	0,88
33.16.16.2010			10. PENGKOLREJO	7,13
33.16.16.2011			11. BOGOREJO	6,31
33.16.16.2012			12. WOTBAKAH	4,01
33.16.16.2013			13. PADAAN	3,00
33.16.16.2014			14. BOGEM	3,58
33.16.16.2015			15. SUMBEREJO	11,63
33.16.16.2016			16. NGIYONO	9,93
33.16.16.2017			17. GAPLOKAN	12,15
33.16.16.2018			18. KALINANAS	8,08

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO